



**WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/333/436.1.2/2017**

TENTANG

**RENCANA PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2018
USULAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA**

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa agar pembentukan Peraturan Daerah dapat disusun secara terencana, terpadu dan sistematis dengan mempertimbangkan/memperhatikan kebutuhan dan skala prioritas serta kewenangan daerah dan untuk menjaga agar Peraturan Daerah tersebut tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional, maka perencanaan penyusunan Peraturan Daerah harus dilakukan dalam suatu Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan Pasal 239 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 403 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta berdasarkan pada ketentuan Pasal 7 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 76 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, perlu menetapkan Rencana Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2017 Usulan Pemerintah Kota Surabaya dengan suatu Keputusan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Rencana Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2018 Usulan Pemerintah Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
9. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 76 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 121).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG RENCANA PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2018 USULAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA.

- KESATU** : Menetapkan Rencana Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2018 Usulan Pemerintah Kota Surabaya, dengan uraian dan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini
- KEDUA** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 9 Nopember 2017

WALIKOTA SURABAYA

ttd.

TRI RISMAHARINI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

Ira Tursilowati, SH.MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19691017 199303 2 006

RENCANA PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2018 USULAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA

A. PRAKARSA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA

1. DINAS KESEHATAN

NO	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		Perangkat Daerah/ Unit kerja/ instansi terkait	KETERANGAN
			BARU	UBAH		Naskah Akademik	Penjelasan atau Keterangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok	Penambahan Kawasan Tanpa Rokok yang semula 5 (lima) kawasan menjadi 7 (tujuh) kawasan		V	Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok		V	1. Dinas Kesehatan; 2. Dinas Lingkungan Hidup; dan 3. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang.	

2. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		Perangkat Daerah/ Unit kerja/ instansi terkait	KETERANGAN
			BARU	UBAH		Naskah Akademik	Penjelasan atau Keterangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kota Surabaya	Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kota Surabaya	V		Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal	V		1. Badan Perencanaan Pembangunan; 2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah.	

3. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PAJAK DAERAH

NO	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		Perangkat Daerah/ Unit kerja/ instansi terkait	KETERANGAN
			BARU	UBAH		Naskah Akademik	Penjelasan atau Keterangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan	Penyempurnaan & penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang terbaru		V	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		V	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah.	

4. DINAS PERDAGANGAN

NO	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		Perangkat Daerah/ Unit kerja/ instansi terkait	KETERANGAN
			BARU	UBAH		Naskah Akademik	Penjelasan atau Keterangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan dan Perindustrian	Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan dan Perindustrian	V		1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Industri 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan	V		1. Dinas Perdagangan; dan 2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu.	

5. BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN USAHA DAERAH SEKRETARIAT DAERAH

NO	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		Perangkat Daerah/ Unit kerja/ instansi terkait	KETERANGAN
			BARU	UBAH		Naskah Akademik	Penjelasan atau Keterangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Pasar Surya	Penyempurnaan tujuan, kinerja dan organisasi Perusahaan Daerah Pasar Surya guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat		V	-	V		1. Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah; dan 2. Perusahaan Daerah Pasar Surya.	
2.	Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Pasar Surya	Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Pasar Surya	V		-	V		1. Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah; dan 2. Perusahaan Daerah Pasar Surya.	
3.	Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan	Merubah ketentuan Perda Kodya Tingkat II Surabaya Nomor 11 Tahun 1982 tentang Pembentukan PD. RPH Kodya Tingkat II Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Perda Kodya Tingkat II Surabaya Nomor 5 Tahun 1988.	V		-	V		1. Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah; dan 2. Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan.	

6. DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

NO	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		Perangkat Daerah/ Unit kerja/ instansi terkait	KETERANGAN
			BARU	UBAH		Naskah Akademik	Penjelasan atau Keterangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Pemberian Nama Jalan, tempat Rekreasi, Taman dan Tempat Lain untuk Jalan	Pemberian Nama Jalan, tempat Rekreasi, Taman dan Tempat Lain untuk Jalan	V		-	V		1. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang; 2. Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau; dan 3. Dinas Perhubungan.	
2.	Rumah Susun	Pengaturan Rumah Susun	V		Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun	V		1. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang; dan 2. Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah.	
3.	Rencana Detail Tata Ruang Kota	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota	V		Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	V		1. Badan Perencanaar Pembangunan; dan 2. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang .	

4.	Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman	Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman		V	-		V	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang; 2. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan; dan 3. Dinas Kebersihan dan Ruang terbuka Hijau. 	
5.	Bangunan	Penyempurnaan dan penyesuaian Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2013 dengan peraturan perundang-undangan yang terbaru	V		Permen PUPR Nomor 5/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Permen PUPR Nomor 6/PRT/M/2017	V		<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang; dan 2. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan. 	

6.	Perubahan Kedua atas Peraturan daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	Penyesuaian tarif retribusi		V	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		V	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang; dan 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah. 	
7.	Pencabutan Peraturan daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	Mencabut seluruh ketentuan Peraturan daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta		V	-		V	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang.	

7. DINAS PEMADAM KEBAKARAN

NO	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		Perangkat Daerah/ Unit kerja/ instansi terkait	KETERANGAN
			BARU	UBAH		Naskah Akademik	Penjelasan atau Keterangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	V		Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	V		1. Dinas Lingkungan Hidup; 2. Dinas Pemadam Kebakaran; 3. Dinas Perhubungan; 4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang; 5. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan; dan 6. Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah.	

8. DINAS PENDIDIKAN

NO	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		Perangkat Daerah/ Unit kerja/ instansi terkait	KETERANGAN
			BARU	UBAH		Naskah Akademik	Penjelasan atau Keterangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan	Penyesuaian dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014		V	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014		V	1. Badan Perencanaan Pembangunan; 2. Dinas Pendidikan; dan 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah.	

9. DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

NO	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		Perangkat Daerah/ Unit kerja/ instansi terkait	KETERANGAN
			BARU	UBAH		Naskah Akademik	Penjelasan atau Keterangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pemberdayaan Usaha Mikro	Pemberdayaan Usaha Mikro di Kota Surabaya	V		Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014	V		1. Badan Perencanaan Pembangunan; 2. Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan 3. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.	
2	Perkoperasian	Perkoperasian di Kota Surabaya	V		Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian	V		1. Badan Perencanaan Pembangunan; 2. Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan 3. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.	

10. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		Perangkat Daerah/ Unit kerja/ instansi terkait	KETERANGAN
			BARU	UBAH		Naskah Akademik	Penjelasan atau Keterangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pencabutan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Mencabut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi		V	-		V	Dinas Komunikasi dan Informatika.	
2	Pencabutan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama	Mencabut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama		V	-		V	Dinas Komunikasi dan Informatika.	

11. BAGIAN LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN ASET SEKRETARIAT DAERAH

NO	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		Perangkat Daerah/ Unit kerja/ instansi terkait	KETERANGAN
			BARU	UBAH		Naskah Akademik	Penjelasan atau Keterangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Kota Surabaya	Pengelolaan barang milik Pemerintah Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah	V		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah	V		1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah; 2. Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah; dan 3. Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset.	

12. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		Perangkat Daerah/ Unit kerja/ instansi terkait	KETERANGAN
			BARU	UBAH		Naskah Akademik	Penjelasan atau Keterangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Penambahan obyek retribusi pemakaian kekayaan daerah		V	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		V	1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah; 2. Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah; dan 3. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.	
2	Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya	Penyempurnaan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya		V	-		V	1. Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah; dan 2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.	

13. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		Perangkat Daerah/ Unit kerja/ instansi terkait	KETERANGAN
			BARU	UBAH		Naskah Akademik	Penjelasan atau Keterangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Menghapus beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2014		V	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013		V	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	

14. DINAS KEBERSIHAN DAN RUANG TERBUKA HIJAU

NO	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		Perangkat Daerah/ Unit kerja/ instansi terkait	KETERANGAN
			BARU	UBAH		Naskah Akademik	Penjelasan atau Keterangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya	penyempurnaan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya		V	-		V	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau.	
2	Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman dan Penyelenggaraan Pemakaman Jenazah	penyempurnaan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman dan Penyelenggaraan Pemakaman Jenazah		V	-		V	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau.	

15. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. MOHAMAD SOEWANDHIE

NO	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		Perangkat Daerah/ Unit kerja/ instansi terkait	KETERANGAN
			BARU	UBAH		Naskah Akademik	Penjelasan atau Keterangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Penetapan Tarif Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Mohamad Soewandhie	Penetapan Tarif Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Mohamad Soewandhie	V		Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Rumah Sakit	V		1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah; 2. Dinas Kesehatan; dan 3. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Mohamad Soewandhie.	

16. BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH

NO	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		Perangkat Daerah/ Unit kerja/ instansi terkait	KETERANGAN
			BARU	UBAH		Naskah Akademik	Penjelasan atau Keterangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Perubahan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya	Perubahan beberapa nomenklatur Perangkat Daerah		V	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah		V	1. Bagian Organisasi; 2. Badan Perencanaan Pembangunan; dan 3. Bagian Hukum.	

17. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		Perangkat Daerah/ Unit kerja/ instansi terkait	KETERANGAN
			BARU	UBAH		Naskah Akademik	Penjelasan atau Keterangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat		V	-		V	Satuan Polisi Pamong Praja	

18. DINAS PENGELOLAAN BANGUNAN DAN TANAH

NO	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		Perangkat Daerah/ Unit kerja/ instansi terkait	KETERANGAN
			BARU	UBAH		Naskah Akademik	Penjelasan atau Keterangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pencabutan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Golongan III Milik Pemerintah Daerah Tingkat II Surabaya	Mencabut seluruh ketentuan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Golongan III Milik Pemerintah Daerah Tingkat II Surabaya		V	-		V	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah.	

B. DAFTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH KUMULATIF TERBUKA

NO	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		Perangkat Daerah/ Unit kerja/ instansi terkait	KETERANGAN
			BARU	UBAH		Naskah Akademik	Penjelasan atau Keterangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Daftar Rancangan Peraturan Daerah Kumulatif Terbuka akibat putusan Mahkamah Agung.	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Daftar Rancangan Peraturan Daerah Kumulatif Terbuka tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Daftar Rancangan Peraturan Daerah Kumulatif Terbuka akibat pembatalan atau klarifikasi dari Menteri Dalam Negeri/Gubernur Jawa Timur.	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Daftar Rancangan Peraturan Daerah Kumulatif Terbuka akibat perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Program Pembentukan Perda ditetapkan.	-	-	-	-	-	-	-	-

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ira Tursilowati, SH.MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19691017 199303 2 006

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI